Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 10 No 11, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Untuk Mengunrangi Kemiskinan Di Desa Tempurejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember

Enggar Adi Firdaus[1], Edhi Siswanto[2], Muhammad Zefri Kudus[3]

[123] Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jember

A R T I C L E I N F O

Article history:
Received Agustus, 2025
Revised Agustus, 2025
Accepted Agustus, 2025
Available online Agustus , 2025

Enggarupw2@gmail.com, edhisiswanto@unmuhjember.ac.id,muhammadzefrikudus@gmail.com

This is an open access article under the CC BY-SA license. Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

A B S T R A K

Kemiskinan merupakan permasalahan multisektoral yang memerlukan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari kementerian, lembaga, hingga masyarakat. Di Desa Tempurejo, kemiskinan berdampak pada rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan, yang pada gilirannya menghambat peningkatan taraf hidup serta kualitas sumber daya manusia. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor keberhasilan dan tantangan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Implementasi PKH di desa ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018, mencakup proses validasi data, penetapan penerima, penyaluran bantuan, pendampingan, peningkatan kemampuan keluarga (P2K2), verifikasi komitmen, pembaruan data, dan transformasi kepesertaan. Program ini terbukti efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan melalui sosialisasi yang baik, ketepatan sasaran, penyaluran terstruktur, serta perubahan perilaku positif KPM.

Kata Kunci: Program Keluarga Harapan (PKH), Efektivitas, Kemiskinan, Kesejahteraan Masyarakat

A B S T R A C T

Poverty is a multisectoral problem that requires the involvement of various parties, from ministries and institutions to the community. In Tempurejo Village, poverty has an impact on low levels of education and skills, which in turn hinders improvements in living standards and the quality of human resources. This study aims to identify the factors of success and challenges in the implementation of the Family Hope Program (PKH). The implementation of PKH in this village has been in accordance with the Regulation of the Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia Number 1 of 2018, covering data validation processes, beneficiary selection, assistance distribution, accompaniment, family capacity building (P2K2), commitment verification, data updates, and participant transformation. This program has proven effective in improving community welfare and reducing poverty rates through good socialization, accurate targeting, structured distribution, and positive behavioral changes among KPM.

Keywords: *Family Hope Program (PKH), Effectiveness, Poverty, Community Welfare*

1. PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah persoalan kompleks yang mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan kelembagaan, sehingga penanganannya memerlukan kolaborasi menyeluruh antara pemerintah dan masyarakat (Haftu, 2019). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2020), angka kemiskinan di daerah pedesaan cenderung lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan. Hambatan utama yang memperkuat siklus kemiskinan mencakup keterbatasan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, serta sumber daya produktif. Sebagai langkah penanganan, pemerintah meluncurkan Program Keluarga Harapan (PKH), yakni bantuan sosial bersyarat yang

*Corresponding author
E-mail addresses: enggarupw2@gmail.com

ditujukan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia melalui perluasan akses pendidikan dan kesehatan bagi keluarga miskin.

Sejumlah studi sebelumnya mengindikasikan bahwa PKH memiliki potensi signifikan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan (Poluakan & Nurwati, 2019; Pertiwi et al., 2019). Meskipun demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian yang membahas implementasi PKH pada skala lokal, khususnya terkait peran Dinas Sosial serta tingkat keterlibatan masyarakat di desa. Berbagai permasalahan seperti ketidaktepatan sasaran penerima, ketidakmerataan distribusi bantuan, dan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur program, menjadi tantangan yang cukup besar (Efendy et al., 2023). Situasi ini menegaskan perlunya kajian komprehensif yang mengkaji penerapan PKH dalam kerangka sosial-budaya tertentu serta sejauh mana dinamika pemerintahan daerah memengaruhi capaian program.

Dari perspektif praktis maupun kebijakan, penguatan pelaksanaan PKH menjadi prioritas mendesak, tidak hanya sebagai strategi pengurangan kemiskinan, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan sosial. Di Desa Tempurejo, Kabupaten Jember, yang memiliki tingkat kemiskinan relatif tinggi (BPS Kabupaten Jember, 2022), keberhasilan program ini memegang peranan penting dalam peningkatan kualitas hidup warga. Integrasi perlindungan sosial dengan elemen pemberdayaan, seperti Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2), berpotensi menghasilkan efek jangka panjang dalam memutus rantai kemiskinan lintas generasi. Namun, pencapaian tersebut menuntut kerja sama yang solid antara pemerintah daerah, pendamping PKH, dan para penerima manfaat.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji tingkat efektivitas PKH dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga serta mengurangi kemiskinan di Desa Tempurejo, dengan merujuk pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Fokus analisis diarahkan pada pelaksanaan program, ketepatan sasaran penerima, ketepatan waktu penyaluran bantuan, partisipasi warga, serta hambatan yang ditemui di lapangan. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan potret menyeluruh mengenai realitas pelaksanaan PKH di lingkungan pedesaan.

Nilai tambah penelitian ini terletak pada kontribusinya dalam menghubungkan celah antara rancangan kebijakan dan penerapan PKH di tingkat komunitas. Dari sisi teoritis, temuan penelitian memperkaya literatur mengenai bantuan sosial bersyarat dengan menekankan hubungan antara kebijakan sosial, tata kelola pemerintahan lokal, dan peran serta masyarakat. Dari segi praktis, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi pembuat kebijakan dan pelaksana lapangan untuk memaksimalkan kinerja PKH, sehingga tidak hanya menjawab kebutuhan jangka pendek, tetapi juga membangun dasar yang kokoh bagi kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

2.TINJAUAN PUSTAKA

Efektifitas

Dalam kerangka efektivitas, pemahaman mendalam terhadap istilah ini dapat ditelusuri melalui beragam perspektif yang disajikan dalam literatur. Nur et al. (2023) mendefinisikan efektivitas sebagai tingkat ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan, yang diukur dari sejauh mana target kuantitas, kualitas, dan waktu dapat direalisasikan. Sedarmayanti, sebagaimana dikutip oleh Nur et al. (2023), memperluas definisi tersebut dengan memandang efektivitas sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian tujuan, yang aplikasinya meluas pada berbagai bidang, termasuk organisasi dan pengelolaan kinerja. Selain itu, Fahmi dan Ratnawati (2021) menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi memegang peranan penting dalam

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 10 No 11, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

meningkatkan kinerja pegawai, yang mengindikasikan bahwa penyediaan sarana dan sumber daya yang tepat mampu mempercepat pencapaian target organisasi. Di sisi lain, temuan Sukma (2022) menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran kontekstual juga dapat mendorong efektivitas proses belajar, mengisyaratkan bahwa konsep efektivitas memiliki relevansi lintas bidang, termasuk sektor pendidikan.

Sejumlah teori utama menjadi pijakan dalam memahami efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Teori efektivitas memaparkan bahwa pencapaian tujuan diukur melalui indikator seperti tingkat pemahaman terhadap program, akurasi sasaran penerima, ketepatan waktu pelaksanaan, keberhasilan mencapai target, serta adanya perubahan yang signifikan (Sutrisno, 2007). Pendekatan ini menegaskan bahwa efektivitas tidak semata diukur berdasarkan hasil kuantitatif, tetapi juga kualitas serta dampak yang dihasilkan dari program tersebut.

Kesejahteraan Keluarga

Konsep kesejahteraan masyarakat yang menjadi sasaran utama Program Keluarga Harapan (PKH) merujuk pada kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial setiap warga negara, sehingga mereka dapat hidup layak serta menjalankan peran sosialnya secara optimal (UU No. 11 Tahun 2009). Ukuran kesejahteraan ini dapat dinilai berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) maupun Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), yang mencakup pemenuhan kebutuhan pokok, rasa aman, keterlibatan dalam aktivitas sosial, hingga tercapainya aktualisasi diri. PKH sendiri merupakan bentuk bantuan tunai bersyarat (conditional cash transfer) yang mewajibkan penerimanya untuk mematuhi komitmen di bidang pendidikan dan kesehatan, dengan tujuan memutus mata rantai kemiskinan lintas generasi (Resina et al., 2023; Pertiwi et al., 2019).

Cerminan kesejahteraan sosial dapat dilihat dari kondisi kehidupan masyarakat yang diukur melalui tingkat kelayakan hidup anggotanya. Salah satu definisi kesejahteraan menggambarkannya sebagai kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Individu dapat dianggap makmur apabila merasa bangga terhadap hidupnya, mempunyai segala sesuatu yang dibutuhkan secara pantas, hidup dalam suasana damai dan tenteram, terbebas dari ancaman maupun tekanan kemiskinan, serta meyakini bahwa keadilan telah hadir dan dirasakan dalam kehidupannya.

Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu bentuk bantuan sosial yang digagas pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial. Inisiatif ini dirancang untuk menekan angka kemiskinan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya keluarga yang berada dalam kategori miskin. PKH adalah contoh implementasi program *Conditional Cash Transfer* (CCT), yaitu pemberian bantuan tunai kepada keluarga penerima manfaat dengan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi. Persyaratan tersebut mencakup komitmen dalam bidang pendidikan anak serta kesehatan keluarga, misalnya pengecekan kesehatan rutin bagi ibu hamil dan anak-anak.

Fokus utama penyelenggaraan PKH adalah meningkatkan taraf hidup penerima manfaat melalui perluasan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Pemerintah menargetkan pemutusan mata rantai kemiskinan secara struktural dengan memberikan dukungan finansial kepada keluarga yang benar-benar layak menerima bantuan. Bantuan ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari sekaligus membuka peluang bagi keluarga untuk memperbaiki kualitas hidup secara berkesinambungan (Resina et al., 2023). Selain itu, program

*Corresponding author
E-mail addresses: enggarupw2@gmail.com

ini juga diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan kesehatan sebagai dua pilar utama dalam upaya pengentasan kemiskinan jangka panjang (Pertiwi et al., 2019).

Berbagai studi menunjukkan bahwa PKH cenderung memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan, meskipun pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi tantangan yang bervariasi di setiap daerah. Secara teoretis, penelitian terdahulu banyak membahas efektivitas program dari sisi hasil (*outcome*), namun masih minim kajian yang mengupas secara mendalam hubungan antara kebijakan sosial, peran Dinas Sosial, serta partisipasi aktif masyarakat di tingkat desa. Dari perspektif empiris, kajian yang secara rinci menggambarkan mekanisme implementasi PKH di pedesaan, khususnya mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya dalam konteks sosial tertentu, masih relatif terbatas.

Berangkat dari tinjauan tersebut, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut melalui analisis kualitatif atas strategi dan praktik pelaksanaan PKH di Desa Tempurejo, Kabupaten Jember. Penelitian ini tidak hanya menilai efektivitas berdasarkan capaian indikator, tetapi juga mengeksplorasi peran koordinasi antar-pemangku kepentingan dan tingkat keterlibatan masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai implementasi bantuan sosial bersyarat di tingkat lokal sekaligus memberikan rekomendasi strategis guna meningkatkan keberlanjutan efektivitas PKH.

3.METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif. Metode kualitatif merupakan teknik penelitian yang menitikberatkan pada pengamatan terhadap fenomena atau gejala yang berlangsung secara alami (Abdussamad, 2021). Pendekatan ini berlandaskan prinsip naturalistik dan berorientasi pada pengamatan langsung di lingkungan. Salah satu bentuk penelitian kualitatif adalah penelitian deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan makna dari data atau peristiwa yang diamati peneliti, disertai penyajian bukti pendukung. Pemahaman mendalam terhadap fenomena yang dikaji sangat bergantung pada keterampilan serta ketelitian peneliti dalam melakukan proses analisis. Dalam proses ini, peneliti berupaya melakukan reduksi dan pemurnian data secara optimal agar dapat menemukan makna sejati dari fenomena tersebut (Nasution, 2023).

Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti menjadikan ucapan dan perilaku manusia sebagai sumber data utama, yang kemudian dilengkapi dengan data pendukung seperti arsip, dokumen, dan bahan lain yang relevan. Secara garis besar, sumber data dalam penelitian dibedakan menjadi dua kategori, yaitu primer dan sekunder. Sumber data primer merupakan informasi yang diperoleh secara langsung dari narasumber atau pihak pertama. Data primer ini digunakan untuk menjawab permasalahan atau fenomena penelitian, dan dapat dikumpulkan melalui wawancara dengan informan yang relevan atau lewat pengamatan langsung peneliti di lokasi penelitian. Sementara itu, sumber data sekunder adalah informasi yang diperoleh secara tidak langsung, atau bukan berasal dari pihak pertama. Data jenis ini biasanya diambil dari berbagai referensi seperti dokumen, buku, jurnal ilmiah, sumber daring, dan bahan literatur lainnya. Perannya adalah sebagai pendukung data primer, sehingga dapat memperkuat proses analisis yang dilakukan peneliti.

Pengumpulan Data

Secara umum, pengumpulan data pada penelitian kualitatif dilakukan dengan berbagai teknik, antara lain wawancara mendalam secara bertahap (depth interview), observasi partisipatif (participant observation), serta diskusi kelompok terarah (focus group discussion).

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 10 No 11, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

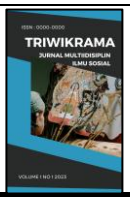

Instrumen yang sering digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung objek penelitian dalam konteks aslinya. Selanjutnya, wawancara dilakukan melalui interaksi tatap muka antara peneliti dan partisipan penelitian, dengan metode tanya jawab yang terstruktur maupun semi-terstruktur. Selain itu, peneliti juga memanfaatkan dokumentasi untuk memastikan kesesuaian dan relevansi data dengan fokus penelitian. Dokumen yang digunakan dapat berupa catatan, arsip, foto, atau bahan tertulis lainnya. Data yang diperoleh melalui observasi maupun wawancara akan memiliki tingkat kredibilitas yang lebih kuat apabila diperkuat dengan bukti dokumentasi yang relevan terhadap permasalahan yang sedang dikaji.

Analisi Data

Prosedur penelitian grounded theory yang dimodifikasi dari Strauss & Corbin menerapkan teknik analisis data yang mencakup tiga tahapan, yaitu *open coding*, *axial coding*, dan *selective coding* (Nasution, 2023). Pada fase *open coding*, peneliti melakukan proses identifikasi serta membentuk sejumlah kategori berdasarkan informasi yang berkaitan dengan fenomena yang sedang dikaji. Setelah kategori tersebut terbentuk, peneliti mengorganisasikannya ke dalam format lain, seperti model visual, dengan memanfaatkan paradigma pengkodean untuk menemukan data yang relevan dengan rumusan pertanyaan penelitian. Proses ini dikenal sebagai *axial coding*. Tahap terakhir, yaitu *selective coding*, dilakukan dengan menyusun narasi yang menggambarkan hubungan antar kategori yang telah dibuat. Pada tahap ini, peneliti juga mengembangkan hipotesis yang bertujuan menjelaskan keterkaitan di antara kategori tersebut secara menyeluruh.

4.HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Realisasi Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Tempurejo Kabupaten Jember

Program Keluarga Harapan (PKH) ialah bantuan tunai bersyarat bagi keluarga berpenghasilan rendah yang terdaftar sebagai penerima manfaat. Program ini ditujukan untuk meningkatkan akses layanan kesehatan, pendidikan, dan dukungan bagi penyandang disabilitas serta lansia. PKH tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan sosial, tetapi juga untuk menjaga kesejahteraan masyarakat sesuai visi Presiden dan amanat konstitusi. Tahap awal pelaksanaan meliputi pertemuan pendahuluan yang sekaligus menjadi proses validasi data. Validasi dilakukan untuk memastikan informasi calon penerima sesuai dengan kondisi lapangan. Sebagaimana berikut yang di sampaikan Fefen Efendi selaku Kaur Kesejahteraan Desa Tempurejo:

> “ setelah surat keputusan penetapan calon KPM terbit, data awal dikirim melalui aplikasi e-PKH berbasis digital. Pendamping PKH kemudian melakukan validasi bersamaan dengan pertemuan awal bagi calon KPM. Sebelum pelaksanaan, pendamping berkoordinasi dengan camat atau pemerintah desa untuk menentukan lokasi kegiatan. Surat undangan juga disebar kepada calon KPM, perangkat desa, tenaga kesehatan, tenaga pendidikan, dan pihak terkait. Langkah ini bertujuan agar semua pihak terlibat mendukung keberhasilan program. PKH.” (wawancara 30 juni 2025)

Penetapan KPM PKH hanya dilakukan jika calon penerima memenuhi kriteria dan komponen yang dipersyaratkan. Proses ini diawali dengan validasi data serta verifikasi komitmen atau pembaruan informasi. Data yang lolos validasi kemudian diajukan untuk penetapan resmi melalui keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial RI. Validasi dinyatakan sah jika seluruh komponen yang disyaratkan terpenuhi. Setelahnya, calon penerima secara resmi

*Corresponding author
E-mail addresses: enggarupw2@gmail.com

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 10 No 11, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

berstatus KPM PKH. Hal ini sejalan dengan pernyataan Fefen Efendi, selaku Kepala Urusan Kesejahteraan Desa Tempurejo:

> "Hasil validasi data calon penerima akan dinyatakan sah apabila telah memenuhi kriteria setiap komponen yang dipersyaratkan. Setelah proses tersebut, data yang telah valid akan diproses untuk penetapan sebagai KPM PKH melawati surat ketetapan dari direktur. Pada tahap inilah, calon penerima resmi ditetapkan sebagai KPM PKH." (wawancara 30 juni 2025)

Penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dilakukan kepada keluarga penerima manfaat yang telah ditetapkan, memiliki komponen kepesertaan, memenuhi kewajiban sesuai komponen tersebut, serta mengikuti pertemuan peningkatan kemampuan setiap bulan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Fefen Efendi dalam perbincangan bersama peneliti, sebagai berikut:

> "Pembagian bantuan saat ini dilakukan dengan cashless, berbeda pada mula mula awal penerapannya di tahun 2014 yang pencairannya dilakukan di kantor pos dan diberikan langsung dalam bentuk tunai. Sejak tahun 2016 hingga sekarang, penyaluran telah beralih menjadi nontunai, langsung masuk kepada rekening KPM PKH yang dapat memperoleh dengan menggunakan kartu keluarga sejahtera. Besaran bantuan disesuaikan dengan jumlah bagian yang dimiliki, maksimal tiga orang dalam satu keluarga. Jika memiliki semua bagian itu, maka yang dihitung adalah tiga bagian dengan nilai tertinggi. Pencairan bantuan bergantung pada hasil verifikasi komitmen, dengan sistem penyaluran setiap tiga bulan sekali atau empat tahap dalam setahun. Tahap pertama biasanya disalurkan pada bulan Maret, tahap kedua pada bulan Juni, dan tahap ketiga pada bulan September, yang penyalurannya didasarkan pada hasil penilaian komitmen KPM untuk periode Mei, Juni, Juli, dan Agustus yang datanya telah diinput dan dilakukan final closing. Proses ini berjalan dengan pola yang sama setiap tahunnya." (wawancara juni 2025)

Berdasarkan keterangan beberapa informan yang disampaikan melalui wawancara dengan peneliti, dapat disimpulkan bahwa mekanisme penyaluran bantuan sosial PKH di Desa Tempurejo pada awal pelaksanaannya tahun 2014 dilakukan melalui kantor pos, di mana bantuan diberikan secara tunai kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH. Memasuki tahun 2016, sistem penyaluran mengalami perubahan menjadi nontunai dengan transfer langsung kepada rekening atas nama KPM PKH, yang dapat diperoleh menggunakan kartu keluarga sejahtera. Besaran indeks serta jenis komponen bantuan sosial PKH yang diterima setiap KPM berbeda-beda, menyesuaikan komponen kepesertaan yang dimiliki masing-masing penerima.

PEMBAHASAN

Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Dalam Mengurangi Kemiskinan Di Desa Tempurejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember

Berdasarkan amanat yang tertuang dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945, cita-cita luhur bangsa Indonesia adalah mewujudkan tatanan masyarakat yang adil, makmur, dan berfokus pada kesejahteraan bersama. Walaupun penanggulangan kemiskinan serta peningkatan kualitas hidup rakyat selalu menjadi prioritas utama dalam setiap rencana pembangunan, persoalan kemiskinan tetap menjadi tantangan yang belum teratasi sepenuhnya. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menjawab persoalan tersebut adalah melalui Program Keluarga Harapan (PKH), yakni program pembangunan sosial yang dirancang guna

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 10 No 11, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

memperbaiki taraf hidup masyarakat. Ketentuan terkait pelaksanaan PKH diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018, yang menetapkan mekanisme penyaluran dan pelaksanaan bantuan jaminan sosial secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Sebagai bentuk bantuan sosial bersyarat, PKH bertujuan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Efektivitas mencerminkan keterkaitan antara sasaran yang telah ditetapkan dengan capaian yang berhasil diraih, yang penilaiannya dapat dilakukan melalui berbagai sudut pandang. Konsep ini memiliki peranan penting karena memberikan gambaran komprehensif mengenai sejauh mana sebuah organisasi mampu merealisasikan tujuannya. Dengan kata lain, efektivitas berfungsi sebagai tolok ukur keberhasilan suatu tindakan dalam memenuhi target yang telah ditentukan.

Sutrisno (2007) mengemukakan lima variabel untuk menilai tingkat efektivitas, yakni pemahaman terhadap program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, ketercapaian tujuan, serta adanya perbaikan yang terlihat nyata. Penulis akan memaparkan hasil penelitian mengenai efektivitas penerapan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tempurejo. Berdasarkan indikator-indikator tersebut, temuan dari penelitian lapangan disajikan sebagai berikut:

1) Pemahaman Program

Kegiatan sosialisasi ditujukan kepada calon penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dengan tujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai syarat menjadi peserta, prosedur pembukaan rekening, hak serta kewajiban yang dimiliki, dan konsekuensi yang akan diterima apabila melanggar ketentuan. Sosialisasi ini dipandang sebagai tahap awal untuk mengenalkan program pemerintah tersebut kepada masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan fasilitator PKH, Ibu Tus Lutfialissa, beliau menyampaikan bahwa:

> “Kegiatan sosialisasi Program Keluarga Harapan (PKH) umumnya dilaksanakan di kantor desa atau di kediaman pendamping PKH. Sebelum kegiatan berlangsung, calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima surat undangan resmi untuk menghadiri pertemuan perdana. Sosialisasi ini memberikan dampak positif bagi masyarakat Desa Tempurejo, karena mereka memperoleh pemahaman awal mengenai tujuan, manfaat, hak, dan kewajiban yang harus dipenuhi sebelum bantuan diberikan. Selain sebagai sarana informasi, pertemuan awal juga menjadi tahap pengelompokan calon penerima ke dalam komponen pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Langkah ini memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran sesuai kebutuhan masing-masing penerima.” (wawancara 10 juli 2025)

Untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan benar-benar akurat serta sesuai dengan kriteria kelayakan komponen PKH, pertemuan awal dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk melakukan proses validasi. Tahapan ini dilaksanakan dengan memperbandingkan data awal calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH dengan dokumen pendukung, seperti kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK), kemudian mencocokkannya dengan kondisi dan fakta terbaru di lapangan. Dalam praktiknya, proses validasi ini dapat dilaksanakan melalui aplikasi e-PKH dan/atau dengan menggunakan formulir validasi.

2) Tepat Sasaran

Mengacu pada data yang berawal melaui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Tempurejo telah berjalan sesuai sasaran.

*Corresponding author
E-mail addresses: enggarupw2@gmail.com

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 10 No 11, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

Berdasarkan penjelasan Bapak Ahmad Kholili selaku Kepala Urusan Pemerintahan Desa Tempurejo, mekanisme distribusi PKH telah dilaksanakan dengan optimal dan memberikan hasil yang dianggap memuaskan, bahwa:

> "Penyaluran bantuan PKH di wilayah ini dinilai sudah tepat sasaran. Hal tersebut disebabkan karena data penerima berasal langsung dari pusat. Mekanismenya, pemerintah desa mengusulkan data seluruh warga Desa Tempurejo melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) kepada Dinas Sosial. Setelah keputusan tersebut, data penerima disalurkan ke Dinas Sosial yang kemudian memberikan instruksi kepada koordinator PKH di masing-masing wilayah hingga sampai ke pendamping. Informasi mengenai siapa penerima PKH diketahui pemerintah desa melalui surat undangan penerima yang dibagikan oleh pendamping. Dengan demikian, peran pemerintah desa hanya sebatas mengajukan data dan memfasilitasi pelaksanaan program PKH." (wawancara 30 juni 2025)

Hasil wawancara memperlihatkan bahwasanya Pemerintah Desa Tempurejo telah mendistribusikan bantuan PKH dengan sasaran yang tepat. Selaras dengan tujuan program yang berfokus pada keberlanjutan manfaat, PKH dipandang memiliki potensi signifikan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat. Bantuan yang disalurkan terbukti membantu warga dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Karena penerima manfaat tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang disediakan langsung oleh pemerintah pusat, pelaksanaan PKH di Desa Tempurejo dinilai efektif dalam menetapkan sasaran penerima.

3) Tepat Waktu

Pengaturan waktu yang efektif dapat menjadi kunci tercapainya keberhasilan, sedangkan pelaksanaan program yang tidak maksimal justru berpotensi menjadikan waktu sebagai sumber kegagalan. Proses penyaluran bantuan sosial PKH dilakukan melalui identifikasi keluarga penerima bantuan yang terlihat dalam perkumpulan kelompok atau mengikuti sesi pertambahan kapasitas tiap bulan, mematuhi komitmen sesuai komponen yang dimiliki, serta terlibat aktif dalam berbagai kegiatan yang telah ditetapkan. Dalam wawancara dengan peneliti, Fefen Efendi selaku Petugas Kesejahteraan Desa Tempurejo menyampaikan penjelasan berikut:

> "Pada setiap pencairan dana PKH tahap kedua, ketiga, dan keempat yang dilaksanakan empat kali dalam setahun, selalu dilakukan pembaruan atau pemutakhiran data. Namun, saat ini proses pemutakhiran tersebut dilakukan setiap bulan oleh pendamping PKH dengan bantuan perangkat desa. Kegiatan pemutakhiran data ini bertujuan buat mengonfirmasi kondisi sosial keluarga, guna memastikan adakah kondisi kemiskinan mereka sudah berganti menjadi bukan miskin, atau untuk mencatat perubahan seperti peserta yang meninggal dunia atau bercerai, sehingga bantuan dapat dihentikan." (wawancara 30 juni 2025)

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari sejumlah narasumber melalui wawancara, pada awal tahun 2014 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tempurejo menerima bantuan sosial melalui pembayaran tunai di kantor pos. Namun, sejak tahun 2016, metode penyaluran diubah menjadi sistem non-tunai dengan memanfaatkan kartu kombinasi, di mana dana bantuan diberikan langsung ke rekening bank tiap-tiap KPM. Jumlah bantuan yang diterima tiap rumah tangga bervariasi, menyesuaikan dengan indeks serta jenis komponen bantuan sosial PKH yang dimiliki oleh setiap penerima.

4) Tercapainya Tujuan

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 10 No 11, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

Sosialisasi tahap awal diantisipasi mampu memberikan pemahaman mendasar kepada para penerima manfaat terkait tujuan, hak, kewajiban, serta manfaat yang dapat diperoleh melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini dirancang sebagai upaya mengurangi kemiskinan, meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat, memperbaiki mutu sumber daya manusia, dan mendorong terjadinya perubahan perilaku yang positif. Berdasarkan penilaian Ibu Tus Lutfialissa terhadap hasil wawancara dengan fasilitator PKH Desa Tempurejo,

> "Agar supaya tujuan Program bantuan tunai bersyarat ini dapat terealisasi secara optimal, KPM PKH perlu memanfaatkan bantuan yang diterima secara tepat dan selaras dengan kondisi masing-masing. Sebagai contoh, jika KPM mempunyai unsur pendidikan, maka dana yang dimaksud seharusnya dialokasikan demi menunjang kepentingan pendidikan. Hal yang sama berlaku bagi komponen kesehatan maupun kesejahteraan, di mana bantuan digunakan sesuai peruntukannya." (wawancara 10 juli 2025)

Temuan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya menunjukkan bahwa penerima manfaat PKH meyakini program ini dapat membantu memenuhi kebutuhan mereka dalam aspek kesejahteraan sosial, kesehatan, dan pendidikan. Program PKH dinilai mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup penerima, menambah sumber pendapatan keluarga, serta mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, meskipun belum sepenuhnya mampu mencakup seluruh kebutuhan setiap individu.

5) Perubahan Nyata

Berdasarkan keterangan yang diperoleh melalui wawancara dengan pendamping PKH Desa Tempurejo Bapak Fefen Efendi menunjukkan bahwa :

> "Perubahan perilaku menjadi salah satu bukti nyata yang dialami oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH di Desa Tempurejo. Para KPM kini lebih memahami betapa pentingnya pendidikan dan kesehatan. Dari sisi pendidikan, mereka menyadari kewajiban mengikuti program belajar selama 12 tahun, terbukti dengan anak-anak yang terus bersekolah hingga tingkat SMA. Selain itu, dalam hal kesehatan, para ibu hamil dan balita juga semakin rutin memanfaatkan fasilitas kesehatan seperti posyandu dan puskesmas." (wawancara 30 juni 2025)

Kesadaran diri menjadi faktor kunci dalam mendorong perubahan perilaku nyata bagi KPM PKH. Saat ini, cakupan program telah meluas hingga mencakup pendidikan wajib 12 tahun, pemeriksaan kesehatan rutin bagi ibu hamil, ibu pasca persalinan, ibu menyusui, balita, lanjut usia, serta penyandang disabilitas berat. Peningkatan kesadaran ini dapat diwujudkan melalui partisipasi aktif dan berkelanjutan dalam kegiatan pendampingan, salah satunya dengan menghadiri pertemuan bulanan. Pada forum Pertemuan Peningkatan Kapasitas Keluarga (P2K2), fasilitator umumnya menyampaikan materi yang dirancang untuk mengubah pola pikir dan perspektif peserta.

Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara, Program Keluarga Harapan (PKH) dinilai sebagai strategi yang sangat efektif untuk menunjang keberhasilan upaya pengentasan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, memperluas akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan berkualitas, menciptakan lapangan pekerjaan yang memadai, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Pelaksanaan program ini pada umumnya berada di bawah koordinasi Badan Layanan Sosial. Lebih lanjut, sasaran PKH sejalan dengan arah Kebijakan Pengentasan

*Corresponding author
E-mail addresses: enggarupw2@gmail.com

Kemiskinan (KMK), yang pencapaiannya menuntut adanya pemantauan berkala agar setiap langkah menuju target dapat terlaksana secara optimal.

Ditinjau dari perspektif teori dan hasil temuan di lapangan, PKH terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengurangi angka kemiskinan melalui peningkatan mutu sumber daya manusia. Program ini juga selaras dengan pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030, khususnya dalam bidang pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, serta penyediaan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.

5.SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Temuan penelitian mengindikasikan bahwa implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tempurejo telah berjalan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018, serta memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga penerima manfaat. Program ini efektif memperluas akses keluarga prasejahtera terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan dasar. Berdasarkan indikator efektivitas, seperti tingkat pemahaman peserta, ketepatan sasaran, ketepatan waktu penyaluran, pencapaian target, dan perubahan perilaku, mayoritas capaian telah terpenuhi. Meskipun demikian, masih ditemukan hambatan, antara lain keterbatasan jumlah pendamping, ketidaktepatan sasaran pada beberapa kasus, serta kendala teknis dalam pembaruan data. Kondisi ini menunjukkan perlunya perbaikan mekanisme pelaksanaan agar efektivitas program semakin optimal.

Pelaksanaan PKH di Desa Tempurejo, Kabupaten Jember, telah mampu mendorong kemandirian keluarga penerima manfaat. Keberhasilan tersebut tercermin dari ketepatan penentuan sasaran, kejelasan tujuan program, kegiatan sosialisasi yang berjalan efektif, serta dampak positif yang dirasakan secara nyata. Sejak program ini diterapkan, tingkat kesejahteraan rumah tangga penerima manfaat di desa tersebut mengalami peningkatan signifikan. Bentuk-bentuk peningkatan tersebut antara lain mencakup:

1. Terpenuhinya persediaan makanan keluarga;
2. Berkurangnya dana pendidikan;
3. Meningkatnya pemasukan rumah tangga;
4. Terbentuknya deposito keluarga.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, penulis menyampaikan sejumlah rekomendasi yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi para pihak yang berkepentingan. Rekomendasi tersebut mencakup:

a). Bagi keluarga penerima manfaat, dianjurkan untuk mengoptimalkan penggunaan bantuan yang diterima serta mematuhi seluruh kewajiban sesuai ketentuan, sehingga pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tempurejo, Kabupaten Jember dapat berlangsung lebih efektif dan menghasilkan dampak optimal.

b). Sementara itu, bagi pendamping sosial PKH, disarankan untuk terus meningkatkan kinerja melalui inovasi, pendampingan yang lebih intensif, serta pemberian motivasi positif secara berkelanjutan kepada penerima manfaat. Pendekatan ini diharapkan mampu menjaga kelancaran dan keberlanjutan program. Dengan demikian, efektivitas PKH di Desa Tempurejo dapat terus ditingkatkan dari waktu ke waktu.

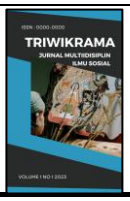

6.DAFTAR PUSTAKA

Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian KUALITATIF*. Makassar: Syakir Media Press.

BPS Kabupaten Jember. (2022). Profil Kemiskinan Maret 2022 Kabupaten Jember. https://jemberkab.bps.go.id/pressrelease/2022/12/30/258/profil-kemiskinan-maret2022-kabupaten-jember.html

Efendy, Z., Rahimullaily, R., & Aini, V. N. (2023). Sistem Pendukung Keputusan Mengunakan Metode TOPSIS Berbasis Aplikasi (Studi Kasus Keluarga Miskin Di Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan). *Remik (Riset Dan E-Jurnal Manajemen Informatika Komputer)*, *7*(1), 142–156.

Haftu, G. G. (2019). Information communications technology and economic growth in Sub-Saharan Africa: A panel data approach. *Telecommunications Policy*, *43*(1), 88–99.

Kasiwi, A. N., Nurmandi, A., Mutiarin, D., & Azka, M. F. (2021). Artificial Data Management in Reaching Conditional Cash Transfer of Program Keluarga Harapan (PKH) Utilizing Simple Addictive Weighting. *Iop Conference Series Earth and Environmental Science*, *717*(1), 12013.

Nasution, A. F. (2023). *METODE PENELITIAN KUALTATIF*. Bandung: Harfa Creative.

Pertiwi, I. P., Fedinandus, F. X., & Limantara, A. D. (2019). Sistem Pendukung Keputusan Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Menggunakan Metode Simple Additive Weighting. *Cahayatech*, *8*(2), 182.

Poluakan, M. V, & Nurwati, N. (2019). Peran Pekerja Sosial Dalam Mengatasi Kemiskinan Kultural Di Indonesia. *Sosio Informa*, *5*(3).

Resina, D., Kamarni, N., & Putra, F. P. (2023). Program Keluarga Harapan: Can It Reduce Poverty and Increase Welfare in Indonesia? Household Level Evidence From Districts/Cities in Indonesia on 2019. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, *14*(2), 277–289.

*Corresponding author
E-mail addresses: enggarupw2@gmail.com